

## ESKALASI AGRICULTURAL COOPERATIVES: PEMBERDAYAAN USAHATANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI PETANI SWADAYA

**Meyzi Heriyanto<sup>1\*</sup>, Masrul Ihsan<sup>2</sup>, Ahmad Rifai<sup>3</sup>, Muhammad Iwan Fermi<sup>4</sup>, Resa Vio Vani<sup>5</sup>, Rahmanul<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>. Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

<sup>2,3,4</sup>. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: xxxxmeyzi.heryanto@lecturer.unri.ac.id

### Abstrak

Artikel ini mengkaji peran koperasi pertanian dalam pemberdayaan petani swadaya kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, Riau. Tujuan utama pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas petani swadaya dalam memenuhi persyaratan administrasi dan keberlanjutan, seperti STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Program ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara petani dan aktor terkait melalui model Penta Helix untuk mendukung keberlanjutan perkebunan. Metode yang digunakan termasuk pelatihan partisipatif, pendidikan, dan fasilitasi akses informasi serta teknologi, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM dengan menggunakan pendekatan Agricultural Cooperatives. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan partisipasi petani swadaya, serta kolaborasi yang memperkuat keberlanjutan usaha perkebunan. Saran meliputi pengembangan pendampingan teknis dan akses teknologi, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mempermudah proses administrasi dan sertifikasi.

**Kata kunci:** Agricultural Cooperatives, Pemberdayaan, Kelapa Sawit. Petani Swadaya

### Abstract

This article examines the role of agricultural cooperatives in empowering smallholder oil palm farmers in Pelalawan Regency, Riau. The primary aim of this initiative is to enhance the capacity of smallholder farmers to meet administrative and sustainability requirements, such as STDB (Planting Registration Certificate) and SPPL (Environmental Management and Monitoring Statement). The program also seeks to strengthen collaboration between farmers and relevant actors through the Penta Helix model to support plantation sustainability. The methods used include participatory training, education, and facilitation of information and technology access, involving government, universities, and NGOs with an Agricultural Cooperatives approach. The results show a significant improvement in smallholder farmers' understanding and participation, as well as collaboration that strengthens plantation sustainability. Recommendations include developing technical assistance and technology access, as well as government policy support to streamline administrative processes and certification.

**Keywords:** Agricultural Cooperatives, Empowerment, Palm Oil, Smallholders

### PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan pendapatan nasional. Namun, di balik kontribusi ekonominya, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keberlanjutan dan kesejahteraan petani swadaya. Petani swadaya, yang mengelola sebagian besar lahan kelapa sawit di Indonesia, sering kali menghadapi kendala dalam mengakses informasi, teknologi, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani mereka. Selain itu, proses administrasi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kerap kali menjadi hambatan tersendiri bagi para petani. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, konsep eskalasi Agricultural Cooperatives (koperasi pertanian) menjadi sangat relevan. Koperasi pertanian dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif bagi petani swadaya, dengan menyediakan berbagai layanan yang mencakup bantuan administrasi, akses ke pasar, pembiayaan, serta edukasi mengenai praktik budidaya yang berkelanjutan. Melalui eskalasi koperasi, petani swadaya dapat dikuatkan dalam berbagai aspek, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka, sekaligus

memastikan bahwa praktik pertanian yang dilakukan memenuhi standar keberlanjutan. Pentingnya Persyaratan ISPO, RSPO, dan PSR:

1. ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil): ISPO menjadi standar nasional Indonesia yang menetapkan pedoman untuk praktik kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan memenuhi persyaratan ISPO, perkebunan kelapa sawit tidak hanya memastikan keberlanjutan lingkungan tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi (darmawan)
2. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): RSPO, sebagai standar internasional, menempatkan perhatian pada aspek lingkungan dan sosial dalam produksi kelapa sawit. Mendapatkan sertifikasi RSPO membuka pintu akses ke pasar global yang semakin memperhatikan praktik bisnis berkelanjutan.(widyaat)
3. PSR (Peremajaan Sawit Rakyat): PSR adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani swadaya melalui peremajaan kebun kelapa sawit. Program ini mencakup peningkatan varietas tanaman, infrastruktur, dan pengelolaan kebun yang berkelanjutan.(siahahan)

Khususnya di wilayah Kabupaten Pelalawan, yang menjadi fokus studi kasus Desa Binaan, realisasi pendaftaran dokumen STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) di Provinsi Riau masih sangat rendah. Hal ini juga berlaku untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), yang realisasinya lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam meningkatkan partisipasi petani swadaya, membentuk kolaborasi sebagai modal sosial yang mendukung keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit, serta menjangkau lebih banyak pihak untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pendekatan Penta Helix. Kondisi eksisting menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berbasis pada pemenuhan aspek-aspek keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi petani swadaya dengan modal pengembangan yang rendah. Contohnya, dalam pelaksanaan program percepatan PSR, himbauan wajib sertifikasi ISPO pada tahun 2025, serta peluang sertifikasi RSPO di tingkat internasional. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan terbesar bagi petani swadaya, dengan berbagai hambatan seperti: (1) Sulitnya akses informasi terkait pemenuhan proses administrasi, (2) Pengumpulan syarat administrasi yang dipengaruhi oleh persentase keuntungan baik materiil maupun non-materiil, (3) Keterbatasan kemampuan dalam mencari edukasi penggunaan sistem layanan berbasis e-government, dan (4) Ketergantungan terhadap aktor penggerak lokal (Local Hero).

Sebagai gerakan yang inklusif, pengabdian ini menargetkan petani swadaya yang merupakan aktor dominan dengan presentase 70% sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2023. Diperkuat dengan fakta bahwa Provinsi Riau memiliki 23% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2023, pengabdian ini berkontribusi secara massif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi petani swadaya dalam mengikuti program keberlanjutan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu fokus utamanya adalah pemenuhan persyaratan administrasi yang krusial seperti SPPL dan STDB. Baik ISPO, RSPO dan PSR memiliki persyaratan yang sama, namun permasalahan yang terjadi di lapangan adalah petani swadaya kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut, karena terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memahami teknologi informasi serta kurangnya informasi yang diterima oleh petani. Pengurusan ISPO, RSPO dan PSR memerlukan keahlian pengawasaan IPTEKS karena sudah digital dengan menggunakan Email, Google Drive, Google Form, Microsoft Office, GPS Maps dan Online Single Submission (OSS). Petani swadaya, sebagai pilar utama dalam industri kelapa sawit, seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tantangan utama yang dihadapi petani swadaya mencakup kurangnya pemahaman, keterbatasan akses informasi, kendala sumber daya, dan tantangan implementasi program peremajaan. Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit bagi petani swadaya, dibutuhkan langkah-langkah konkret dan solusi inovatif yang dapat merespons setiap tantangan yang dihadapi.

#### 1. Kurangnya Pemahaman dan Keterbatasan Akses Informasi:

Pemahaman yang kurang tentang persyaratan ISPO, RSPO, dan PSR menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh petani swadaya. Seiring dengan itu, keterbatasan akses informasi terkait tuntutan dan manfaat dari sertifikasi tersebut semakin mempersulit proses pemahaman dan penerapan kebijakan

keberlanjutan di tingkat petani. Salah satu langkah solutif adalah meningkatkan pemahaman petani melalui pelatihan intensif yang memfokuskan pada prosedur dan manfaat dari setiap persyaratan keberlanjutan. Dalam hal ini, pelatihan dapat diadakan melibatkan pihak terkait, seperti ahli dari perguruan tinggi, ahli pertanian, perwakilan dari lembaga keberlanjutan, dan pihak terkait lainnya. Dengan menyediakan platform pelatihan yang interaktif, seperti Focus Group Discussions (FGD), Workshop, dan Seminar, petani swadaya dapat lebih mudah memahami tuntutan sertifikasi dan manfaat yang dapat mereka peroleh. Selain itu, penggunaan IPTEKS, termasuk email, Google Drive, Google Form, Microsoft Office, GPS Maps, dan Online Single Submission (OSS), dapat diterapkan dalam pelatihan sebagai sarana efektif untuk mempercepat pemahaman dan penerapan persyaratan keberlanjutan. Peningkatan akses informasi juga dapat dicapai melalui pembentukan portal informasi daring yang menyediakan panduan lengkap dan terintegrasi mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi. Portal ini dapat menjadi sumber informasi utama yang dapat diakses oleh petani swadaya kapan pun dan di mana pun, membantu mereka memahami dengan lebih baik tuntutan keberlanjutan yang harus dipenuhi.

## 1. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi:

Tantangan lain yang dihadapi oleh petani swadaya adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal dana dan teknologi. Memenuhi persyaratan sertifikasi, seperti ISPO dan RSPO, seringkali membutuhkan investasi yang signifikan. Tidak semua petani memiliki akses ke dana yang cukup besar untuk memenuhi persyaratan tersebut, dan keterbatasan teknologi menjadi kendala dalam penerapan praktik berkelanjutan. Solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan teknologi melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan kelapa sawit, dan organisasi non-pemerintah. Program bantuan keuangan atau skema pinjaman dengan bunga rendah dapat diterapkan untuk membantu petani swadaya memperoleh dana yang diperlukan. Pemberian insentif kepada perusahaan teknologi untuk berkolaborasi dengan petani swadaya juga dapat meningkatkan akses mereka terhadap teknologi yang mendukung praktik berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan petani swadaya dapat memperoleh sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Pemberdayaan petani swadaya dalam hal sumber daya dan teknologi bukan hanya akan meningkatkan keberlanjutan usaha mereka tetapi juga memberikan dampak positif pada produktivitas dan efisiensi operasional mereka.

## 2. Tantangan Implementasi PSR:

Peremajaan kebun melalui program PSR menawarkan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani swadaya. Namun, tantangan dalam implementasi program ini masih menjadi kenyataan yang dihadapi oleh banyak petani. Kurangnya pemahaman tentang manfaat PSR, ketidaktauan terkait tata cara memenuhi persyaratan, birokrasi yang rumit, dan kesulitan dalam mendapatkan varietas tanaman yang sesuai menjadi hambatan utama. Langkah pertama untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan pemahaman petani tentang manfaat PSR melalui pelatihan dan penyuluhan khusus. Pemahaman yang kuat tentang potensi keuntungan jangka panjang dari peremajaan kebun dapat membuka pikiran petani terhadap pentingnya program ini. Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga riset pertanian, dan perusahaan kelapa sawit dapat membantu menyederhanakan birokrasi yang terkait dengan implementasi PSR. Penyediaan informasi yang jelas dan akses mudah terhadap panduan implementasi dapat mempercepat adopsi program peremajaan ini. Keterlibatan petani swadaya dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan PSR juga sangat penting. Melibatkan mereka dalam pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan pasar dapat meningkatkan keberhasilan implementasi program ini.

Maka dari itu pemberdayaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi petani swadaya dalam memenuhi persyaratan administrasi dan keberlanjutan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi seperti STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Mendorong petani swadaya untuk lebih aktif terlibat dalam program-program keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di tingkat nasional maupun internasional, seperti PSR, ISPO, dan RSPO. Memfasilitasi petani swadaya dalam mengakses informasi terkait proses administrasi dan sertifikasi, serta memberikan pendampingan teknis untuk memanfaatkan teknologi digital dan layanan e-government. Membangun kerjasama antara petani swadaya, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. Membantu petani swadaya dalam proses pemenuhan persyaratan administratif seperti STDB dan SPPL, yang merupakan langkah penting untuk memperoleh akses ke

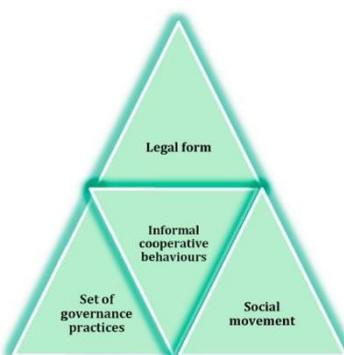
program sertifikasi dan dukungan lainnya. Dan Mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mematuhi standar-standar keberlanjutan yang diakui, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani swadaya dan menjaga kelestarian lingkungan.

## METODE

Pada tahap awal, dilakukan pemetaan kebutuhan petani swadaya terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui diskusi dan wawancara mendalam yang diikuti oleh 10 pengurus KUD Beringin Jaya dan 2 Aparatur Desa. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa mayoritas petani mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait regulasi ISPO dan RSPO, serta menghadapi kendala dalam hal permodalan dan akses terhadap sarana produksi pertanian. Selanjutnya, pada tahap implementasi, program pelatihan dan pendampingan intensif dilaksanakan, yang melibatkan penyuluhan mengenai standar keberlanjutan ISPO dan RSPO, manajemen keuangan, serta teknik budidaya yang ramah lingkungan. Tahap berikutnya difokuskan pada pembentukan koperasi petani swadaya sebagai wadah untuk meningkatkan akses petani terhadap pasar, permodalan, dan informasi. Capaian luaran dari kegiatan ini antara lain berupa artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi, artikel ilmiah yang dimuat di prosiding nasional, dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan yang dapat diakses secara online, buku dengan ISBN yang sedang dalam proses layout, buku saku penerbit Taman Karya (ISBN) yang juga dalam proses layout, kekayaan intelektual berupa hak cipta yang telah diajukan, dan artikel yang dimuat di media massa cetak atau elektronik lokal yang dapat diakses secara online.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian "Eskalasi Agricultural Cooperatives: Sustainability Usaha Perkebunan Kelapa Sawit bagi Petani Swadaya" menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan administrasi petani swadaya. Pelatihan manajemen dan administrasi telah memperkenalkan teknologi digital yang memudahkan pengelolaan data, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Pelatihan pendaftaran STDB dan SPPL telah memberikan petani pemahaman penting tentang persyaratan legal, mengurangi risiko hukum, dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Dukungan teknis dalam input data membantu memastikan keakuratan dokumen administrasi, sementara selebaran edukasi dan sosialisasi langsung telah meningkatkan kesadaran petani tentang sertifikasi ISPO dan PSR. Evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa kendala, rencana tindak lanjut mencakup peningkatan pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi dengan mitra untuk memastikan pencapaian yang lebih baik di masa depan. Rencana tindak lanjut ini berfokus pada peningkatan pemahaman, penyempurnaan data, dan distribusi informasi untuk memperkuat pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di tingkat petani swadaya.

Pentingnya administrasi yang terpenuhi dalam perkebunan kelapa sawit, seperti adanya Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Sertifikat Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sangat signifikan untuk pendaftaran program Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat/PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Administrasi yang lengkap dan sesuai dengan regulasi merupakan syarat utama untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi. Maka itu ini dilaksanakan mengacu pada teori Eskalasi agriculture cooperative yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Teori Agriculture Cooperatives Raquel Ajates, 2020

- a. Informal Cooperative Behaviours: Dimensi ini mengacu pada perilaku kooperatif informal yang belum diatur di antara produsen pangan, yang telah ada sebelum terbentuknya koperasi formal. Perilaku kooperatif ini muncul secara alami dari kebutuhan petani untuk bertahan hidup dan memastikan kecukupan pangan. Hal ini mencerminkan bahwa praktik kooperasi di sektor pertanian sering kali mendahului pembentukan hukum dan institusi yang formal. Dalam konteks pertanian kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Riau, perilaku koperasi informal ini dapat terlihat dalam bentuk gotong royong atau kerja sama antar petani dalam mengelola lahan, berbagi sumber daya seperti alat pertanian, dan saling membantu dalam proses produksi. Meski belum diinformalkan, bentuk kerja sama ini sudah memberikan manfaat nyata bagi para petani swadaya.
- b. Legal: Dimensi ini merujuk pada status hukum dari sebuah koperasi, apakah koperasi tersebut telah diinkorporasikan secara hukum atau belum, dan dalam bentuk hukum apa. Dalam berbagai negara, regulasi mengenai koperasi sangat bervariasi, dengan beberapa negara memiliki banyak undang-undang khusus koperasi, sementara negara lain tidak memiliki bentuk hukum koperasi yang spesifik. Di Indonesia, koperasi petani biasanya diakui secara hukum melalui bentuk Koperasi Unit Desa (KUD) atau Koperasi Petani. Pengakuan hukum ini penting untuk memberikan dasar bagi koperasi untuk beroperasi secara legal, mendapatkan akses ke sumber daya, dan melindungi hak-hak anggotanya. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman petani tentang aspek legal koperasi dan bagaimana memanfaatkan status hukum ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- c. Governance: Model tata kelola koperasi sangat terkait dengan bentuk hukumnya dan mencakup praktik-praktik tata kelola yang diikuti oleh koperasi serta pengaruh dari konteks tata kelola pangan yang lebih luas. Di koperasi pertanian, tata kelola sering kali dihadapkan pada dilema antara prinsip satu anggota satu suara dengan kebutuhan untuk memberikan kekuatan suara yang lebih besar kepada anggota yang berkontribusi lebih banyak. Dalam konteks koperasi petani kelapa sawit, tata kelola yang baik akan memastikan bahwa keputusan diambil secara demokratis dan transparan, namun juga mempertimbangkan kontribusi dan kepentingan semua anggota. Selain itu, koperasi harus tetap mematuhi prinsip-prinsip koperasi yang telah disepakati, seperti keadilan dalam pembagian keuntungan dan akses yang setara terhadap sumber daya.
- d. Social Movement: Kondisi ekonomi yang menantang sering kali menjadi dasar munculnya gerakan sosial yang mendorong pembentukan koperasi, baik di tingkat konsumen maupun produsen. Koperasi muncul sebagai respon untuk memenuhi kebutuhan spesifik kelompok-kelompok yang kesulitan mengakses pangan atau lahan dan input untuk memproduksi pangan. Dalam sejarahnya, koperasi pertama di Inggris dan Irlandia didirikan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemandirian pangan dan mendanai proyek kerja sama industri dengan visi mengubah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, terutama di sektor kelapa sawit, koperasi juga dapat dilihat sebagai alat untuk memberdayakan petani kecil agar memiliki akses yang lebih baik ke pasar, input pertanian, dan informasi. Gerakan koperasi ini penting dalam memperkuat posisi petani kecil di pasar yang sering kali didominasi oleh perusahaan besar.

Eskalasi atau penguatan perkebunan kelapa sawit bagi petani swadaya melalui konsep Agriculture Cooperatives memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan ini. Melalui KUD dan Desa, petani dapat:

1. Mendapatkan Bantuan Administrasi dan Legal: Koperasi dapat menyediakan layanan administrasi yang membantu petani dalam mengurus STDB dan SPPL. Dengan adanya tim khusus atau kerjasama dengan pihak ketiga, koperasi dapat mempercepat proses pendaftaran dan memastikan semua dokumen terpenuhi.
2. Peningkatan Kapasitas dan Edukasi: Melalui pelatihan yang diselenggarakan, petani bisa lebih memahami pentingnya STDB dan SPPL serta proses untuk mendapatkannya. Edukasi ini juga mencakup cara pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan standar sertifikasi, sehingga petani lebih siap dalam memenuhi persyaratan ISPO.
3. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis: Koperasi bisa menjalin kemitraan dengan lembaga sertifikasi, pemerintah, dan LSM untuk mendapatkan dukungan teknis dan legal dalam proses pengurusan STDB dan SPPL. Kolaborasi ini juga memungkinkan koperasi untuk menjadi perantara antara petani dan regulator, mempermudah petani dalam memahami dan memenuhi persyaratan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pelatihan Manajemen dan Administrasi:**

Peserta dan Materi: Pelatihan ini melibatkan perwakilan dari Desa Beringin Indah, KUD Beringin Jaya, dan Asosiasi Petani Sawit Bertuah Riau. Fokus pelatihan adalah pemanfaatan dan penggunaan alat-alat digital seperti email, Google Forms (Gform), dan Google Drive (Gdrive) dalam pengumpulan data petani. Tujuan: Meningkatkan kapasitas manajemen dan administrasi para peserta agar lebih efisien dalam mengelola data petani swadaya. Dengan menguasai penggunaan email dan aplikasi digital lainnya, diharapkan proses administrasi dan komunikasi menjadi lebih efektif dan terorganisir.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan dan Manajemen

**Pelatihan Pendaftaran STDB dan SPPL:**

Materi Pelatihan: Fokus pelatihan ini adalah pada proses pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Tujuan: Membantu petani swadaya memahami persyaratan dan prosedur pendaftaran STDB dan SPPL, yang merupakan langkah penting dalam legalisasi dan pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan.



Gambar 3. Pelatihan dan Pendaftaran STDB dan SPPL

**Sosialisasi dan Pendampingan Input Data Petani Sawit Swadaya:**

Pendampingan Teknis: Mahasiswa KKN memberikan pendampingan teknis dalam mempersiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran STDB dan SPPL. Pendampingan ini mencakup pengumpulan dan verifikasi dokumen-dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Tanah. Tujuan: Memastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh petani swadaya, sehingga mereka dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran resmi.



Gambar 4. Sosialisasi dan Pendampingan  
Pembuatan Selebaran Informasi Edukasi:

Materi dan Distribusi: Selebaran ini berisi informasi tentang persyaratan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta manfaat dari pembuatan email bagi petani swadaya. Edukasi ini dilakukan secara langsung kepada kelompok petani, baik melalui sosialisasi di KUD maupun secara door-to-door (jemput bola). Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman petani swadaya tentang pentingnya sertifikasi ISPO dan PSR, serta memfasilitasi mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.



Gambar 5. Pembuatan dan Penyebaran Selebaran

## Kegiatan Rekapitulasi Hasil Input Data oleh Mahasiswa KKN:

**Proses dan Hasil:** Mahasiswa KKN bertanggung jawab untuk melakukan input data administrasi yang telah dikumpulkan dari petani swadaya ke dalam sistem pendaftaran STDB dan SPPL. Proses ini dilakukan di lokasi yang telah difasilitasi oleh KUD Beringin Jaya. Jumlah Data yang berhasil di rekapitulasi yakni berjumlah 85 Data. Tujuan: Memastikan bahwa data administrasi petani telah terinput dengan benar dan lengkap, sehingga mereka dapat terdaftar secara resmi dalam sistem perkebunan berkelanjutan.



Gambar 6. Data Rekapitulasi dan Proses Rekapitulasi Bertahap  
**Evaluasi Pelatihan dan Edukasi Lanjutan: KEGIATAN TAHAP 2 (24 – 25 Agustus 2024)**

Metode Evaluasi: Setelah seluruh kegiatan pelatihan selesai, dilakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan email, Gform, dan Gdrive, serta kesiapan mereka dalam pendaftaran STDB dan SPPL. Tujuan: Mengidentifikasi area yang masih memerlukan peningkatan dan memberikan umpan balik kepada peserta agar dapat terus mengembangkan kapasitas mereka. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di tingkat petani swadaya. Keterlibatan KUD Beringin Jaya sebagai mitra juga berperan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan proker ini.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian "Eskalasi Agricultural Cooperatives: Sustainability Usaha Perkebunan Kelapa Sawit bagi Petani Swadaya" menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan administrasi petani swadaya. Pelatihan manajemen dan administrasi telah memperkenalkan teknologi digital yang memudahkan pengelolaan data, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Pelatihan pendaftaran STDB dan SPPL telah memberikan petani pemahaman penting tentang persyaratan legal, mengurangi risiko hukum, dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Dukungan teknis dalam input data membantu memastikan keakuratan dokumen administrasi, sementara selebaran edukasi dan sosialisasi langsung telah meningkatkan kesadaran petani tentang sertifikasi ISPO dan PSR. Evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa kendala, rencana tindak lanjut mencakup peningkatan pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi dengan mitra untuk memastikan pencapaian yang lebih baik di masa depan. Rencana tindak lanjut ini berfokus pada peningkatan pemahaman, penyempurnaan data, dan distribusi informasi untuk memperkuat pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di tingkat petani swadaya.

## SARAN

Kegiatan pengabdian ini dapat ditingkatkan dengan mengembangkan model pendampingan berkelanjutan melalui mentor lokal atau klinik sertifikasi, serta memperluas kolaborasi dengan mitra strategis seperti pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan untuk penyediaan subsidi perangkat dan akses kredit mikro. Selain itu, penyebaran informasi melalui media lokal dan kampanye kesadaran publik dapat meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya sertifikasi ISPO dan RSPO. Evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pelatihan serta diversifikasi produk berbasis sawit juga perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing petani dan keberlanjutan usaha perkebunan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Riau melalui Dana Dipa tahun 2024 atas dukungan pendanaan yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Bantuan ini sangat berkontribusi dalam mendukung upaya pemberdayaan petani swadaya kelapa sawit menuju pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2015). Sustainability standards for palm oil: challenges for smallholder certification under the RSPO. *The Journal of Environment & Development*, 24(3), 292-314.
- Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector: benefits and challenges for smallholders (No. 74). *Studies*.
- Bremer, J. A., Lobry de Bruyn, L. A., Smith, R. G. B., Darsono, W., Soedjana, T. D., & Cowley, F. C. (2022). Prospects and problems: considerations for smallholder cattle grazing in oil palm plantations in South Kalimantan, Indonesia. *Agroforestry Systems*, 96(7), 1023-1037.
- Dharmawan AH, Nasdian FT, Barus B, Kinseng RA, Indaryanti Y, Indriana H, et al. Kesiapan petani kelapa sawit swadaya dalam implementasi ISPO: Persoalan lingkungan hidup, legalitas dan keberlanjutan. *J Ilmu Lingkung*. 2019;17(2):304–15.
- Hatmaja, D., Andri, S., Heriyanto, M., Mayami, M., & Safitri, S. (2024). Dynamics of collaborative governance of actors in palm oil fresh fruit bunch price setting. In E3S Web of Conferences (Vol. 506, p. 03002). EDP Sciences.

- HERIYANTO, M., FEBRIAN, A. F., ANDINI, F. K., HANDOKO, T., & SURYANA, D. (2021). Antecedents of sustainable competitive advantages: A case study of palm oil industries in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 911-921.
- Heriyanto, M., Mayarni, M., Susanti, R., Habibie, D. K., & Vani, R. V. (2024). Institutional Role of Independent Smallholders in Realizing Sustainable Palm Oil Plantation Governance. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2473-e2473.
- Mayarni, M., Heriyanto, M., RFS, H. T., Bedasari, H., & Vani, R. V. (2024). Street-level Bureaucrat Analysis of Indonesia's oil palm replanting implementation program. In E3S Web of Conferences (Vol. 506, p. 05003). EDP Sciences.
- Mayarni, M., Heriyanto, M., Simanjuntak, H. T. R. F., Bedasari, H., Vani, R. V., Carolina, M. P., & Rahmadini, N. (2023, December). Institutional Governance In The Implementation Of Oil Palm Replanting Policy On Peatlands. In International Conference On Social Science Education (Vol. 3, No. 1, pp. 177-184).
- Sawirman, S. (2020). Small Farmers'discourses On Oil Palm Problems And Some Suggested Policies. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8766-8791.
- Selvadurai, S., Lyndon, N., Illelmi, M., & Rahim, A. (2018). Economic problems faced by oil palm smallholders and its solution: The case of Malaysia. *International Information Institute (Tokyo). Information*, 21(6), 1789-1800.
- Siahaan DR, Maharani E, Hutabarat S. Persepsi Pekebun Swadaya terhadap Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu. *J Trit*. 2023;14(1):100–13.
- Watts, J. D., Pasaribu, K., Irawan, S., Tacconi, L., Martanila, H., Wiratama, C. G. W., ... & Manvi, U. P. (2021). Challenges faced by smallholders in achieving sustainable palm oil certification in Indonesia. *World Development*, 146, 105565.